

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LOMBOK BARAT MENURUT PENGELUARAN 2014-2018



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LOMBOK BARAT MENURUT PENGELUARAN 2014-2018



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

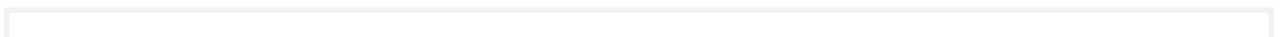
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN  
LOMBOK BARAT MENURUT PENGELUARAN**

**2014-2018**

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



# **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LOMBOK BARAT MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2014-2018**

**ISBN** :  
**No. Publikasi** : 52015.  
**Katalog BPS** : 9302008.5201

**Ukuran Buku** : 21,5 cm X 27,9 cm  
**Jumlah Halaman** : xiii + 82

**Naskah** :  
**Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kabupaten Lombok Barat**

**Penyunting** :  
**Kepala badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat**

**Desain Kover** :  
**Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kabupaten Lombok Barat**

**Diterbitkan Oleh** :  
**@Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat**

**Dicetak Oleh** :  
**CV.MAHARANI**

---

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

# **TIM PENYUSUN**

**Penanggungjawab Umum:  
Drs. Anas, M.Si**

**Penyunting:  
Drs. Anas, M.Si**

**Penulis:  
Septa noor Pradhani, SST  
M Hadi Wiratama, S.E.**

**Pengolah Data:  
Septa Noor Pradhani, SST**

**Gambar Kulit:  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik  
Kabupaten Lombok Barat**

<https://lombokkab.go.id>

# KATA PENGANTAR



Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018 merupakan publikasi rutin yang terbit setiap tahunnya. Dengan mematahkan tahun dasar 2000=100 menjadi 2010=100, publikasi ini diharapkan lebih mengakomodir perkembangan dan kebutuhan data. Disusun oleh BPS Kabupaten Lombok Barat, publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Lombok Barat secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2014-2018 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase. Format dan tabel-tabel yang disajikan pada publikasi ini mengalami modifikasi agar dapat lebih memenuhi permintaan pengguna data.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pemakai data sangat kami harapkan, sehingga pengempurnaan publikasi dapat kami lakukan di masa yang akan datang. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Gerung, Agustus 2019

BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
KEPALA,

Drs. ANAS, M.Si

--halaman ini sengaja dikosongkan--

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



# DAFTAR ISI

## 1 2

### 1 PENDAHULUAN

- 3 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- 6 Perubahan Tahun Dasar PDRB

### METODA ESTIMASI DAN SUMBER

#### DATA 13

- Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) 15
- Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT) 18
- Pengeluaran Kons. Akhir Pemerintah (PK-P) 19
- Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 22
- Perubahan Inventori (PI) 25
- Ekspor – Impor 28

## 3

### TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN/KOTA MENURUT PDRB

#### 31 PENGELUARAN

- 33 Perkembangan PDRB Pengeluaran
- 43 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran
- 44 Konsumsi Akhir Rumahtangga
- 49 Konsumsi Akhir LNPRT
- 50 Konsumsi Akhir Pemerintah
- 53 Pembentukan Modal Tetap Bruto
- 55 Ekspor Barang dan Jasa
- 57 Impor Barang dan Jasa

## 4

### PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN/KOTA 61

- PDRB (NOMINAL) 63
- Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB 64

## 5

## 6

### PENUTUP 69

### 73 LAMPIRAN

## 7

### DAFTAR PUSTAKA 82



# DAFTAR GAMBAR



		Halaman
Gambar 1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018	33
Gambar 2	PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	37
Gambar 3	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	38
Gambar 4	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	39
Gambar 5	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2017**	41
Gambar 6	laju Pertumbuhan PDRB Adh konstan dan konsumsi Rumah tangga Adh. Konstan 2014-2018	48
Gambar 7	Kontribusi Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	52
Gambar 8	laju Pertumbuhan Implisit Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	52
Gambar 9	laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Terhadap laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	53
Gambar 10	laju Pertumbuhan PMTB Terhadap laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	55
Gambar 11	laju Pertumbuhan ekspor Terhadap laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	57
Gambar 12	laju Pertumbuhan Impor Terhadap laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	59




# DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018	35
Tabel 2	PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018	36
Tabel 3	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	38
Tabel 4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	40
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	43
Tabel 6	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018	45
Tabel 7	Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Lombok Barat, 2014-2018	47
Tabel 8	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	48
Tabel 9	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	49
Tabel 10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	51
Tabel 11	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	54
Tabel 12	Perkembangan Ekspor Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	57
Tabel 13	Perkembangan Impor Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	59
Tabel 14	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	64
Tabel 15	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat 2014-2018	65
Tabel 16	Average Propensity To Consume Dan Average Propensity To Save Tahun 2014-2018	66
Tabel 17	Incremental capital Output ratio Kabupaten Lombok barat Tahun 2014-2018	67

# DAFTAR LAMPIRAN



		Halaman
Lampiran 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018	75
Lampiran 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018	76
Lampiran 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016 (persen)	77
Lampiran 4	.Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010-100 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018	78
Lampiran 5	. IHI PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018	79
Lampiran.6	. Laju IHI PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018	80



# BAB 1 PENDAHULUAN

<https://lombokbarakab.bps.go.id>

*--halaman ini sengaja dikosongkan--*

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)<sup>1</sup>. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep<sup>2</sup> penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi

---

<sup>1</sup> Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

<sup>2</sup> *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat<sup>3</sup>, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

---

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik  
- Disebut sebagai pendekatan “riil”  
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut





$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y ( <i>Income</i> )	= PDRB Produksi
C ( <i>Consumption</i> )	= Konsumsi akhir
GFCF ( <i>Gross Fixed Capital Formation</i> )	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
$\Delta$ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta  $\Delta$  Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

## 1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas

antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

### **Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?**

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

### **Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?**

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;

- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

### Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

### Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun<sup>4</sup>;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);

---

<sup>4</sup> SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

### Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
  - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
  - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**


Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

**Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010**

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPR
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

*--halaman ini sengaja dikosongkan--*

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



**BAB 2**  
**METODE ESTIMASI**  
**DAN SUMBER DATA**

<https://icb.bonparatrab.bps-go.id>



--halaman ini sengaja dikosongkan--

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



## BAB II

# METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

### 2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

#### i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran<sup>5</sup>. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

#### ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan

<sup>5</sup> Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

### iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

#### iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

#### v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (ADHB) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

## **2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)**

### **i Pendahuluan**

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### **ii Konsep dan definisi**

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan atau beasiswa.

### **iii. Cakupan**

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan

- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

#### iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

#### v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

## 2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit

institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

## ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

### iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup:

- a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota;
- b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

### iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

### v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market product} + \text{Output Bank Indonesia}$$



Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

## 2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

### i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat

dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

## ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

## iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan

erosi.

#### iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

#### v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply :

PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi :

PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga konstan (t-1) x  
Indeks Produksi (t)

## 2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

### i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

### iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

#### iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

#### v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

##### a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \frac{\text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)}}{\text{Harga per unit}}$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

##### b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB (t-1)}}{\text{IHPB rata-rata (t)}}$$

## 2.6. EKSPOR - IMPOR

### i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impur dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impur dari dan ke suatu wilayah.

### ii Konsep dan definisi

Ekspor-impur didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

### iii Cakupan

Ekspor-Impur ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

### iv Sumber Data

Nilai ekspor-impur wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya


dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



*--halaman ini sengaja dikosongkan--*

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>




**BAB 3**  
**TINJAUAN PEREKONOMIAN**  
**KAB. LOMBOK BARAT**  
**MENURUT PDRB**  
**PENGELUARAN**

<http://lombokbarat.bps.go.id>

*--halaman ini sengaja dikosongkan--*

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



# BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KAB. LOMBOK BARAT MENURUT PDRB PENGELUARAN

## 3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Perkembangan PDRB Pengeluaran di Kabupaten Lombok Barat akan diuraikan pada bagian berikut. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

Nilai PDRB Lombok Barat atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2018 sebesar 14,48 triliun rupiah. Meskipun Lombok Barat terkena dampak gempa yang terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2018, namun PDRB Lombok Barat mampu meningkat

walaupun hanya sebesar 3,76 persen. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan hanya sebesar 0,52 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 13,96 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 10,43 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 10,49 triliun rupiah pada tahun 2018. Selama tahun 2018 perekonomian Lombok Barat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,57 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Meskipun Lombok Barat mengalami guncangan perekonomian akibat gempa, namun masih mampu memproduksi dan mempertahankan nilai tambah bruto. Kondisi ini dikarenakan gempa terjadi pada semester kedua dan tidak semua wilayah Lombok Barat terkena dampak gempa.

Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Jasa kesehatan dimana pada tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 6,72 persen. Peranan lapangan usaha yang paling tinggi dalam perekonomian Kabupaten Lombok Barat disumbang oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan. Dari sisi permintaan akhir, perekonomian Lombok Barat didominasi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari 70 persen total PDRB. Sedangkan komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit rumah tangga (PK\_LNPRT) mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat hingga 13,14 persen.

Pada periode tahun 2014-2018 PDRB Lombok barat atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 10,13 triliun Rupiah (2014); 11,45 triliun Rupiah (2015); 12,63 triliun Rupiah (2016); 13,96 triliun rupiah pada tahun 2017; dan 14,48 triliun rupiah pada tahun 2018. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Lombok Barat pada periode 2014-2018 dapat dilihat dari tabel 1 dan gambar 1 berikut ini:

**Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018**

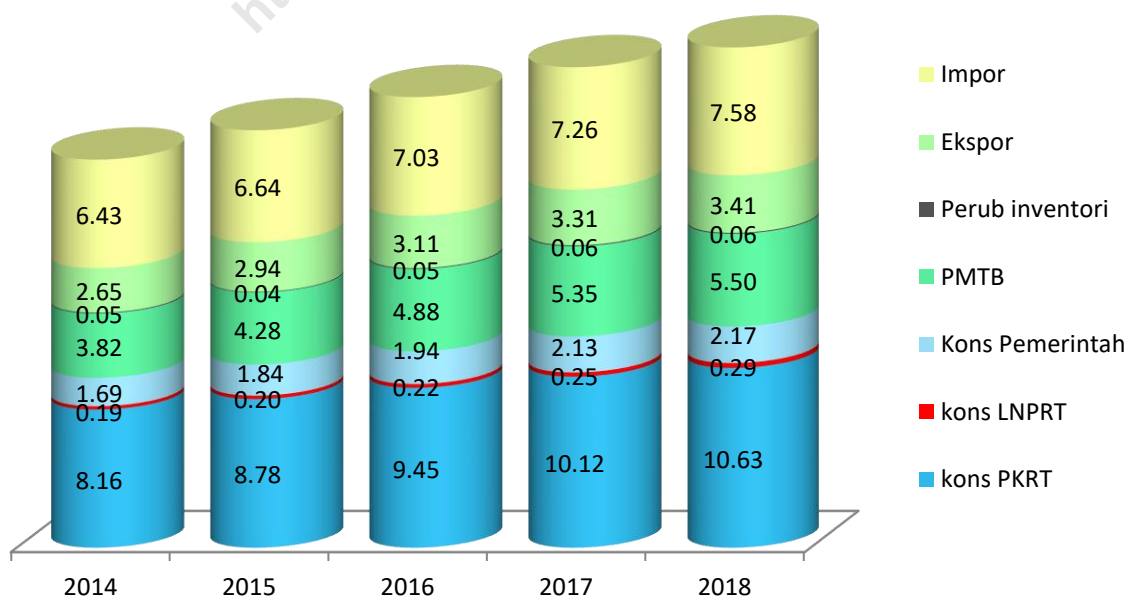
(juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	8,164,870	8,784,658	9,452,763	10,115,601	10,633,903
2. Konsumsi LNPRT	192,241	204,507	222,792	246,589	287,635
3. Konsumsi Pemerintah	1,686,539	1,842,175	1,940,091	2,131,480	2,165,418
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,816,621	4,277,910	4,883,080	5,352,738	5,502,613
5. Perubahan Inventori	50,329	40,133	53,070	60,665	57,871
6. Ekspor	2,649,456	2,939,889	3,113,853	3,306,813	3,414,966
7. Impor	6,428,787	6,641,627	7,032,541	7,258,485	7,582,076
<b>PDRB</b>	<b>10,131,269</b>	<b>11,447,645</b>	<b>12,633,108</b>	<b>13,955,402</b>	<b>14,480,330</b>

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Gambar 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018 (triliun rupiah)**



\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Lombok Barat pada periode 2014-2018 dapat dilihat dari tabel 2 dan gambar 2 berikut ini:

**Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018**

(juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,987,150	7,259,445	7,465,770	7,675,011	7,806,017
2. Konsumsi LNPRT	157,916	163,939	173,360	185,391	209,751
3. Konsumsi Pemerintah	1,211,436	1,233,236	1,248,076	1,332,564	1,332,208
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,875,036	3,134,430	3,398,080	3,595,102	3,604,841
5. Perubahan Inventori	34,339	22,199	33,509	37,809	35,181
6. Ekspor	2,454,208	2,591,456	2,704,736	2,859,838	2,872,434
7. Impor	5,011,778	5,140,351	5,231,310	5,253,471	5,368,544
<b>PDRB</b>	<b>8,708,308</b>	<b>9,264,355</b>	<b>9,792,221</b>	<b>10,432,244</b>	<b>10,491,888</b>

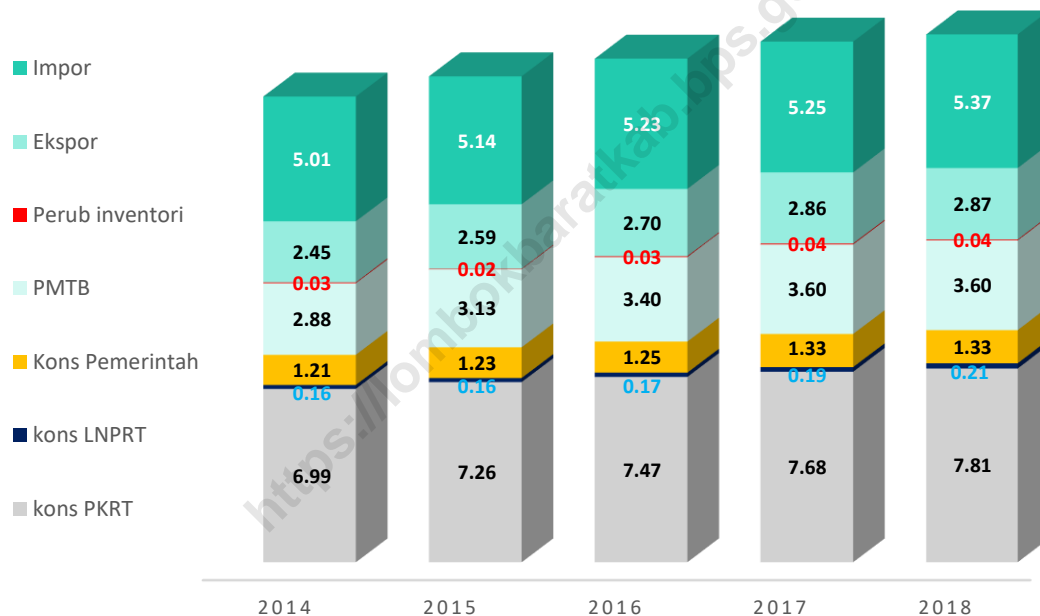
\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Lombok Barat terus meningkat, sejak tahun 2014 hanya sebesar 8,7 triliun Rupiah pada tahun 2014; kemudian 9,3 triliun Rupiah (2015); 9,8 triliun Rupiah (2016); 10,43 triliun Rupiah pada tahun 2017; dan 10,49 triliun rupiah pada tahun 2018.

Pertumbuhan Kabupaten Lombok Barat terlihat dengan jelas pada gambar 2, dimana sejak tahun 2014 hingga 2018 terus mengalami kenaikan. Menariknya hingga tahun 2017 pertumbuhan Kabupaten Lombok Barat selalu diatas 5 persen. Musibah gempa yang mengguncang pulau Lombok terutama di sektor pariwisata Lombok Barat pada pertengahan tahun 2018 memukul perekonomian Lombok Barat. Meskipun demikian perekonomian Kabupaten Lombok Barat masih mampu meningkat sebesar 0,57 persen.

**Gambar 2. PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**



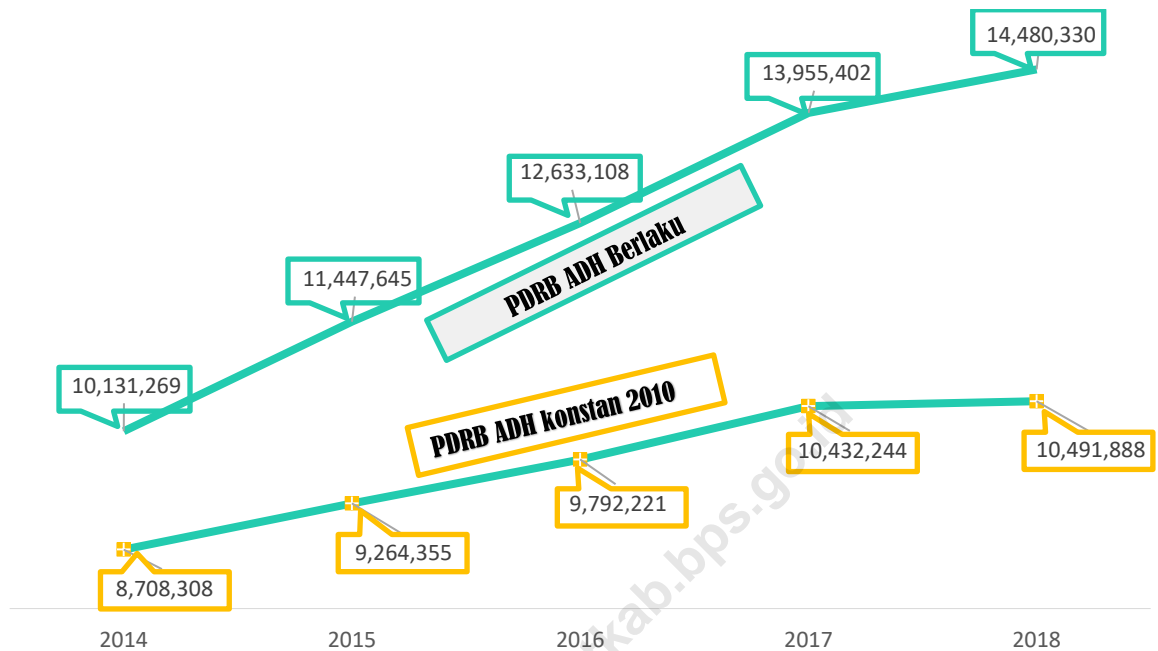
\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Dari gambar 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.



**Gambar 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**



\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**

Komponen Pengeluaran	persentase(%)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	80.59	76.74	74.83	72.49	73.44
2. Konsumsi LNPRT	1.90	1.79	1.76	1.77	1.99
3. Konsumsi Pemerintah	16.65	16.09	15.36	15.27	14.95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	37.67	37.37	38.65	38.36	38.00
5. Perubahan Inventori	0.50	0.35	0.42	0.43	0.40
6. Ekspor	26.15	25.68	24.65	23.70	23.58
7. Impor	63.45	58.02	55.67	52.01	52.36
<b>PDRB</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*Angka Sementara

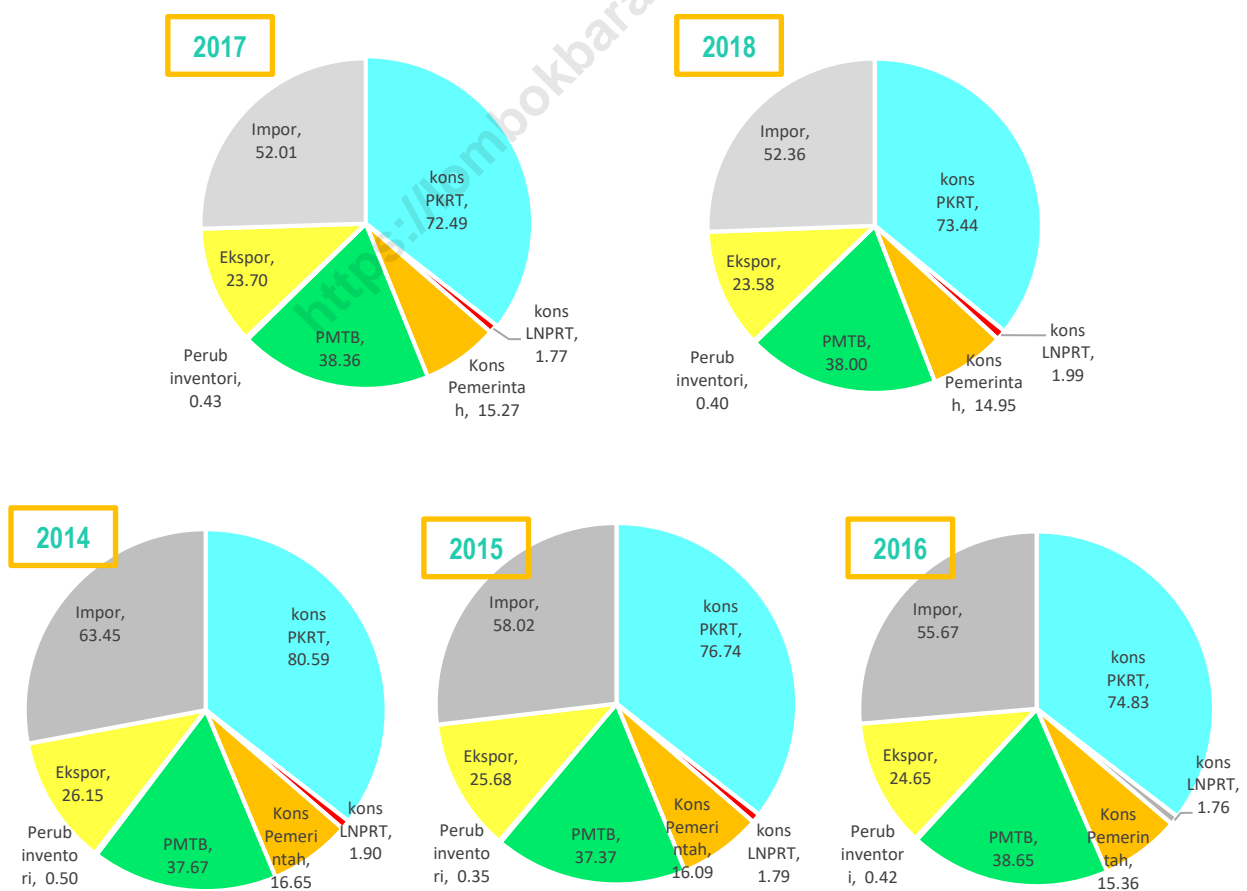
\*\* Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga

(PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2014-2018, PDRB Kabupaten Lombok Barat sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 37,37 persen sampai dengan 38,65 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 23,58 hingga 26,15 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 52,01 hingga 63,45 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

**Gambar 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**



\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah selama tahun 2014 hingga 2018 berkisar antara 13,95 persen sampai dengan 16,65 persen. Konsumsi lembaga Non profit dan komponen perubahan inventori merupakan komponen dengan kontribusi paling kecil dalam membangun PDRB Kabupaten Lombok Barat.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2014-2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan, yakni sebesar 5,70 persen (2014); 6,39 persen (2015); 5,70 persen (2016); 6,54 persen (2017); dan 0,57 persen pada Tahun 2018.

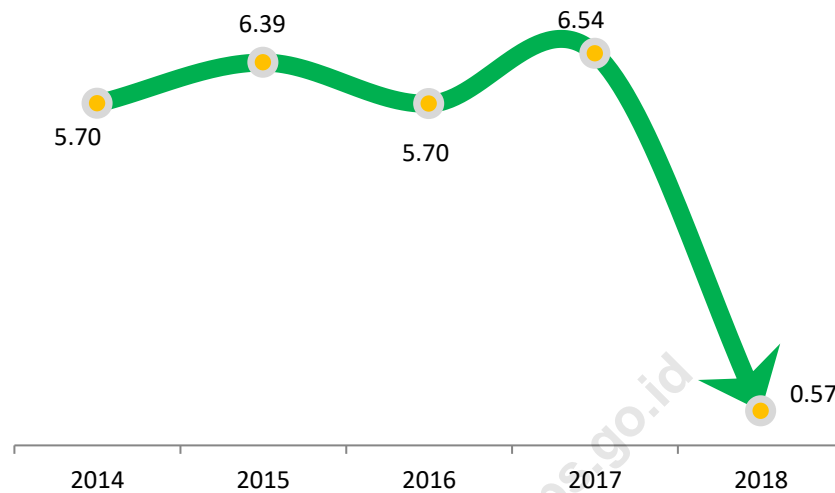
**Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**

Komponen Pengeluaran	Persentase(%)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.54	3.90	2.84	2.80	1.71
2. Konsumsi LNPRT	12.59	3.81	5.75	6.94	13.14
3. Konsumsi Pemerintah	10.51	1.80	1.20	6.77	(0.03)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.60	9.02	8.41	5.80	0.27
5. Ekspor	68.64	5.59	4.37	5.73	0.44
6. Impor	28.82	2.57	1.77	0.42	2.19
<b>PDRB</b>	<b>5.70</b>	<b>6.39</b>	<b>5.70</b>	<b>6.54</b>	<b>0.57</b>

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Gambar 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**



\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi selama 2018 mengalami perlambatan karena peristiwa gempa berkali-kali yang terjadi di Pulau Lombok pada akhir bulan Juli hingga bulan September. Dampak gempa telah menghempaskan pariwisata di Pulau Lombok. Sebenarnya pariwisata Lombok sedang naik daun pada tahun 2018 sebelum gempa terjadi. Banyak event nasional yang diselenggarakan di Pulau Lombok. Selain itu, tingkat kedatangan turis domestik maupun asing juga meningkat tajam. Namun sayangnya peristiwa gempa yang terjadi di utara Pulau Lombok yang mana merupakan basis pariwisata Pulau Lombok berdampak besar dengan anjloknya bisnis pariwisata yang telah mendunia.

Meskipun demikian, perekonomian kabupaten Lombok Barat mampu bertahan dengan laju perekonomian mencapai 0,57 persen. Kondisi ini dikarenakan perekonomian Kabupaten Lombok Barat sedang bergairahnya sebelum gempa terjadi. Dimana ekspor hasil pertanian yang meningkat, meskipun sektor jasa mengalami kontraksi, namun secara total masih mampu bertahan dengan laju sebesar 0,44 persen. Konsumsi LNPRT mengalami kenaikan yang signifikan karena bantuan yang berasal dari lembaga non profit mengalir untuk korban bencana naik secara signifikan. Pada tahun 2018 ini konsumsi pemerintah mengalami kontraksi.

Sebagai komponen yang paling banyak memberikan andil dalam perekonomian Kabupaten Lombok Barat, konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,71 persen pada tahun 2018. Penyebab kenaikan konsumsi rumah tangga selain karena jumlah penduduk yang meningkat juga karena daya beli masyarakat. Namun karena pada tahun 2018 gempa melanda dan berimbas pada perekonomian masyarakat Lombok Barat, membuat daya beli masyarakat sedikit menurun, akan tetapi sejumlah bantuan yang diterima masyarakat Lombok Barat yang berasal dari rumah tangga di kabupaten seantero Indonesia mampu membantu masyarakat yang terkena dampak gempa untuk memenuhi baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan tambahan. Kenaikan konsumsi rumah tangga yang terjadi di tahun 2018 juga termasuk kebutuhan masyarakat yang bukan kebutuhan dasar dan pokok seperti terpal, selimut, pakaian dan lainnya meningkat tajam

Secara umum karena konsumsi rumah tangga dan PMTB memiliki kontribusi yang paling besar dalam membangun PDRB menurut penggunaan Kabupaten Lombok Barat, maka sedikit perubahan pada komponen ini akan berpengaruh cukup signifikan bagi perekonomian Lombok Barat. Membandingkan laju pertumbuhan kedua komponen ini pada tahun 2014 dengan kondisi pada tahun 2018, dimana baik komponen pengeluaran rumah tangga maupun komponen PMTB laju pertumbuhannya mengalami perlambatan tapi tetap bernilai positif. Perkembangan dari masing-masing komponen akan memberikan gambaran lebih lengkap akan nilai tambah Kabupaten Lombok Barat menurut pengeluaran.

Indeks implisit<sup>6</sup> PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2014-2018, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

---

<sup>6</sup> Indeks perkembangan

**Tabel 5. Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**

*persentase (%)*

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.88	3.56	4.63	4.09	3.36
2. Konsumsi LNPRT	11.49	2.47	3.02	3.50	3.10
3. Konsumsi Pemerintah	21.91	7.30	4.06	2.90	1.62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.09	2.81	5.29	3.61	2.52
5. Ekspor	3.77	5.09	1.48	0.44	2.82
6. Impor	3.45	0.73	4.04	2.78	2.22
<b>PDRB</b>	<b>6.65</b>	<b>6.21</b>	<b>4.41</b>	<b>3.69</b>	<b>3.17</b>

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2018, perubahan harga PDRB Kabupaten Lombok Barat sebesar 3,17 persen. Dibandingkan dengan inflasi *y on y* Kota Mataram selama tahun 2018, perubahan harga PDRB Kabupaten Lombok Barat lebih tinggi tipis. Selama tahun 2018 inflasi Kota Mataram sebesar 3,15 persen. Penghitungan perubahan harga PDRB dihitung berdasarkan perubahan harga yang terjadi sewaktu-waktu selama tentang tahun 2018, sedangkan Inflasi *y on y* dihitung berdasarkan kenaikan harga kondisi desember 2017 dan desember 2018. Tidak berbeda jauh kedua hitungan tersebut menandakan perubahan harga di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2018 relatif stabil. Hal ini tentu memberikan indikasi bahwa perekonomian cenderung stabil.

### 3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik

dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Lombok Barat untuk periode 2014-2018.

### 3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Lombok Barat ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Lombok Barat maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2014-2018 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
Atas dasar harga berlaku ( <i>juta rp</i> )	8,164,870	8,784,658	9,452,763	10,115,601	10,633,903
Atas dasar harga konstan 2010 ( <i>juta rp</i> )	6,987,150	7,259,445	7,465,770	7,675,011	7,806,017
Proporsi terhadap pdrb (% atas dasar harga berlaku)	80.59	76.74	74.83	72.49	73.44
Rata-rata konsumsi per-rumah tangga/tahun ( <i>jutarp</i> )					
Atas dasar harga berlaku	45.02	47.77	50.61	53.35	55.27
Atas dasar harga konstan 2010	38.53	39.47	39.97	40.48	40.57
Rata-rata konsumsi per-Kapita/tahun ( <i>juta rp</i> )					
Atas dasar harga berlaku	12.67	13.41	14.21	14.98	15.52
Atas dasar harga konstan 2010	10.84	11.08	11.22	11.37	11.39
Pertumbuhan <sup>7</sup>					
Total konsumsi rt	4.54	3.90	2.84	2.80	1.71
Per-rt	2.84	2.46	1.26	1.27	0.23
Perkapita	2.84	2.26	1.26	1.27	0.23
Jumlah RT ( <i>unit</i> )	181,357	183,901	186,777	189,610	192,401
Jumlah penduduk ( <i>000 org</i> )	644,586	654,892	665,132	675,222	685,161

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Selama periode 2014-2018 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB menurun, yaitu 80,59 persen (2014); 76,74 persen (2015); 74,83 persen (2016); 72,49 persen (2017); dan pada tahun 2018 sebesar 73,44 persen. Meskipun Konsumsi rumah tangga masih mendominasi pada PDRB pengeluaran ini, namun persentase peranan dominannya semakin berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan komponen yang lainnya menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga mampu merangsek untuk lebih berperan dalam perekonomian.

Peranan konsumsi rumah tangga yang terus menurun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga yang melambat. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga mencapai 4,54 persen, sedangkan pada tahun 2018 hanya sebesar 1,71 persen.

<sup>7</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)



Sementara itu, pada perkiraan *adh. Konstan* 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh diatas satu persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 2,84 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik *adh. Berlaku* maupun *adh. Konstan* 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Lombok Barat meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi perkapita secara “riil” berkisar antara 0,23- 2,84 persen. Meskipun melambat, rata-rata konsumsi setiap penduduk selalu meningkat. Kondisi ini menandakan bahwa perekonomian penduduk Lombok Barat terus meningkat kemakmurannya.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga *adh. Konstan* sebesar 4,54 persen pada tahun 2014. Kemudian terus mengalami pertumbuhan positif pada tiga tahun berikutnya yaitu berturut-turut sebesar 3,90 persen (2015); 2,84 persen (2016); dan 2,80 persen (2017). Selanjutnya pada tahun 2018 konsumsi rumahtangga masih tumbuh positif meskipun melambat yaitu sebesar 1,71 persen. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumahtangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah dua persen.

Yang menarik adalah selama 2014 hingga 2018 terjadi pergeseran pola konsumsi rumah tangga Penduduk Kabupaten Lombok Barat. Dimana konsumsi non makanan lebih mendominasi daripada konsumsi makanan, walaupun sebenarnya, secara rata-rata pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan hampir sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 49,44 persen (2014) ; 49,37 persen (2015) ; 49,98 persen (2016); 49,97 persen (2017); dan 49,87 persen pada tahun 2018.

Peningkatan rata-rata konsumsi rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Lombok Barat, 2014-2018**

Kelompok Konsumsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	49.44	49.37	49.98	49.97	49.87
b. Pakaian dan Alas Kaki	3.70	3.71	3.80	3.77	3.82
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	23.38	23.96	23.85	24.03	24.29
d. Kesehatan & Pendidikan	4.47	4.57	4.73	4.87	5.01
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	15.08	14.52	13.69	13.32	13.18
f. Hotel & Restoran	2.10	2.08	2.12	2.22	2.03
g. Lainnya	1.83	1.80	1.83	1.82	1.80
<b>Total Konsumsi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, dan jasa kesehatan.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 8, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,88 persen dan pada tahun 2016 sebesar 4,63 persen. Tahun 2018, peningkatan harga konsumsi akhir rumah tangga sebesar 3,36 persen. kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan rokok yakni sebesar 4,35 persen. Kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya mengalami kenaikan harga terendah sebesar 0,87 persen.

**Tabel 8. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**

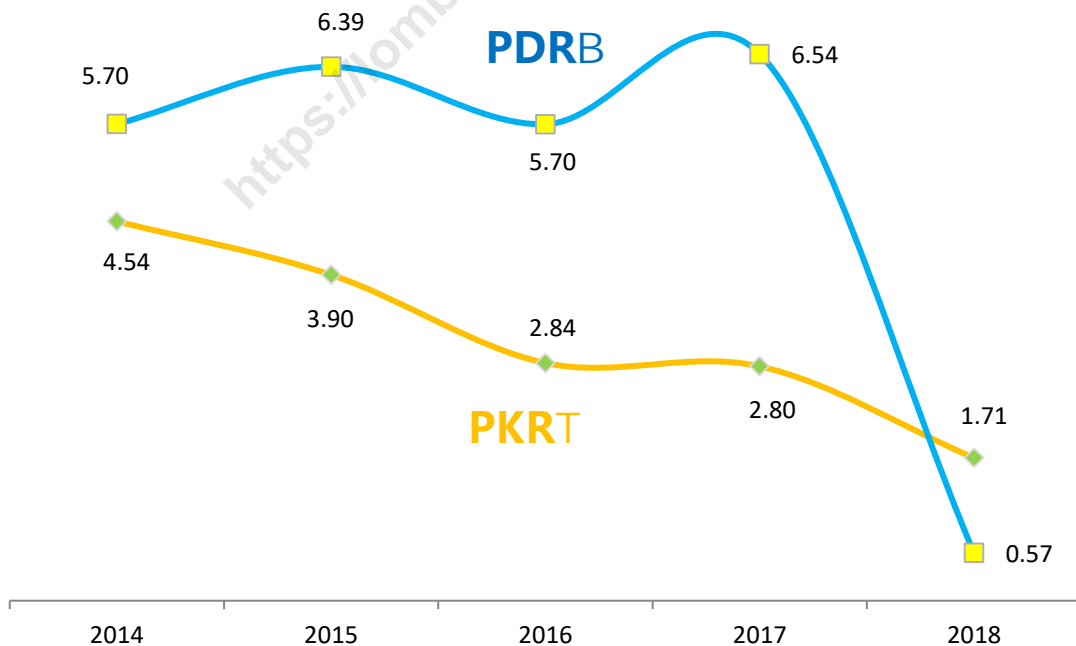
(Persen)

Kelompok Konsumsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5.76	3.88	6.13	4.03	4.35
b. Pakaian dan Alas Kaki	2.73	6.06	6.03	3.82	3.52
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4.32	5.18	3.78	5.79	2.96
d. Kesehatan & Pendidikan	2.30	5.93	7.11	5.93	4.21
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4.84	(1.10)	(0.76)	1.03	0.87
f. Hotel & Restoran	2.67	2.80	5.74	3.10	1.59
g. Lainnya	2.90	3.01	7.22	3.63	2.03
<b>Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>4.88</b>	<b>3.56</b>	<b>4.63</b>	<b>4.09</b>	<b>3.36</b>

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

**Gambar 6. Laju Pertumbuhan PDRB Adh konstan dan konsumsi Rumah tangga Adh. Konstan 2014-2018**



\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

### 3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

**Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. Atas dasar Harga Berlaku ( <i>juta Rp</i> )	192,241	204,507	222,792	246,589	287,635
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010 ( <i>juta Rp</i> )	157,916	163,939	173,360	185,391	209,751
<b>Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)</b>	1.90	1.79	1.76	1.77	1.99
<b>Pertumbuhan (% ADHK 2010)</b>	12.59	3.81	5.75	6.94	13.14

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT naik dari Rp. 192,241 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp. 287,64 miliar pada tahun 2018. Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT naik drastis pada tahun 2014 dan 2018. Hal ini wajar terjadi karena ada peristiwa pemilihan DPR, DPRD, dan presiden. Dibandingkan tahun 2016, pengeluaran konsumsi LNPRT tahun 2017 mengalami peningkatan hingga 6,94 persen.

Pada tahun 2018 konsumsi LNPRT mengalami kenaikan yang signifikan karena peristiwa gempa menggerakkan lembaga-lembaga non profit untuk membantu para korban bencana alam. Banyaknya sumbangan yang disalurkan oleh lembaga non profit

sangat berperan dan membantu untuk memulihkan perekonomian pasca gempa. Di sisi lembaga non profit, tingginya antusiasme masyarakat Indonesia bahkan dunia untuk membantu korban gempa dengan menyalurkan bantuannya kepada lembaga non profit yang sebagian berada di tanah Lombok Barat. Bantuan tersebut dibelanjakan dan diolah oleh Lembaga Non profit, kemudian disalurkan kepada korban gempa.

### **3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah**

Pengeluaran konsumsi pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 1,69 triliun, kemudian pada tahun-2018 konsumsi pemerintah mencapai 2,17 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan dalam rentang waktu lima tahun ini. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
Atas Dasar Harga Berlaku ( <i>juta Rp</i> )	1,686,539	1,842,175	1,940,091	2,131,480	2,165,418
Atas Dasar Harga Konstan 2010 ( <i>juta Rp</i> )	1,211,436	1,233,236	1,248,076	1,332,564	1,332,208
Proporsi terhadap PDRB (% Atas Dasar Harga Berlaku)	16.65	16.09	15.36	15.27	14.95
Pertumbuhan <sup>8</sup> konsumsi pemerintah (% Atas dasar Harga Konstan)	10.51	1.80	1.20	6.77	(0.03)

\*angka sementara

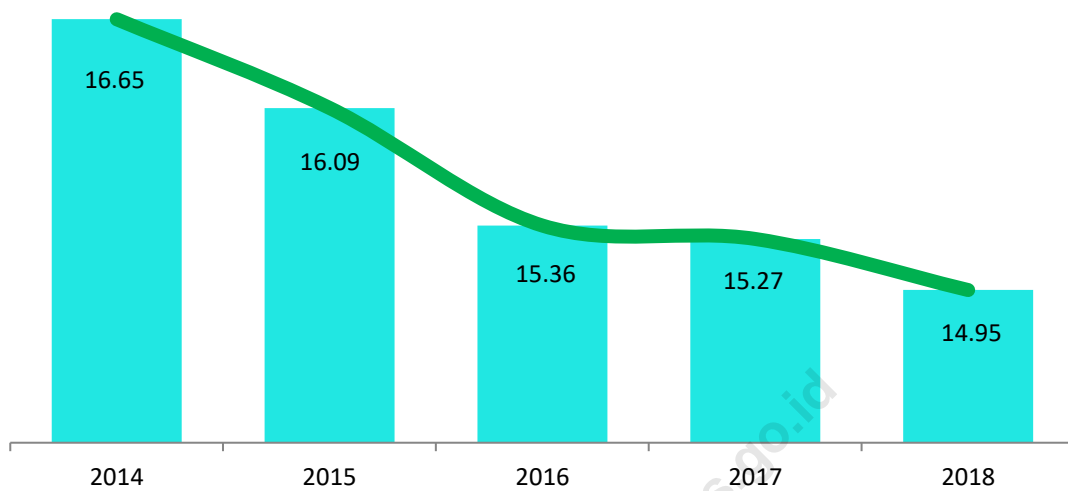
\*\*angka sangat sementara

Menarik untuk dicermati bahwa pada tahun 2018 konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 0,03 persen. Konsumsi pemerintah mengalami kontraksi karena peristiwa gempa ini menyebabkan pemasukan PAD macet selama pertengahan akhir tahun 2018. Hal ini menyebabkan PAD Kabupaten Lombok Barat anjlok sehingga mengganggu pagu belanja pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat melakukan penghematan pada biaya operasional dan lebih cenderung menganggarkan untuk membantu korban bencana gempa.

Menilik peranan komponen konsumsi pemerintah terhadap perekonomian Kabupaten Lombok Barat, ternyata peranan konsumsi pemerintah pada tahun 2018 ini terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir. Peranan komponen konsumsi pemerintah hanya sebesar 14,95 persen, dimana lima tahun sebelumnya mampu berperan sebanyak 16,65 persen. Kontribusi konsumsi pemerintah Adh Berlaku mengalami trend yang berfluktuatif selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2018. Keadaan ini terjadi disebabkan oleh peningkatan kontribusi komponen lain yang meningkat atau menurun jauh lebih banyak dari konsumsi pemerintah.

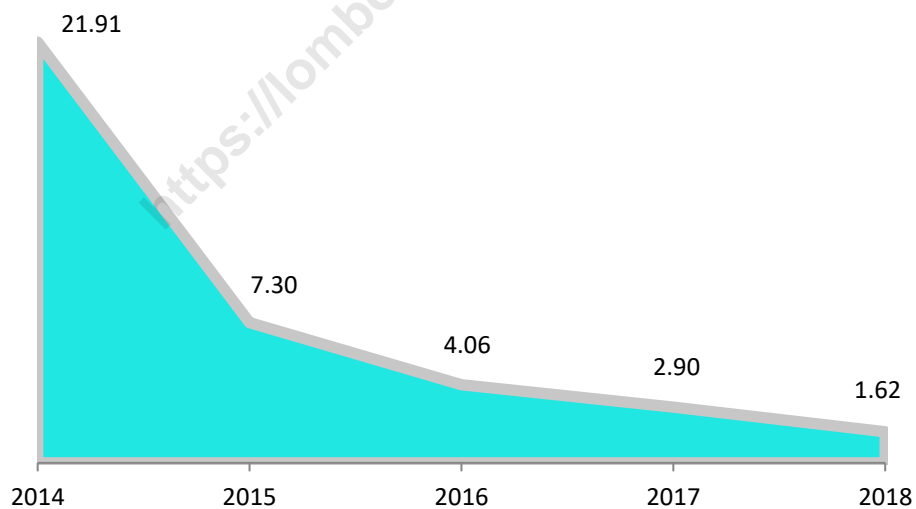
<sup>8</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (*atas dasar harga konstan / ATAS DASAR HARGAK 2000*)

**Gambar 7. Kontribusi Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**



\*angka sementara  
\*\*angka sangat sementara

**Gambar 8. laju Pertumbuhan Implisit Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**

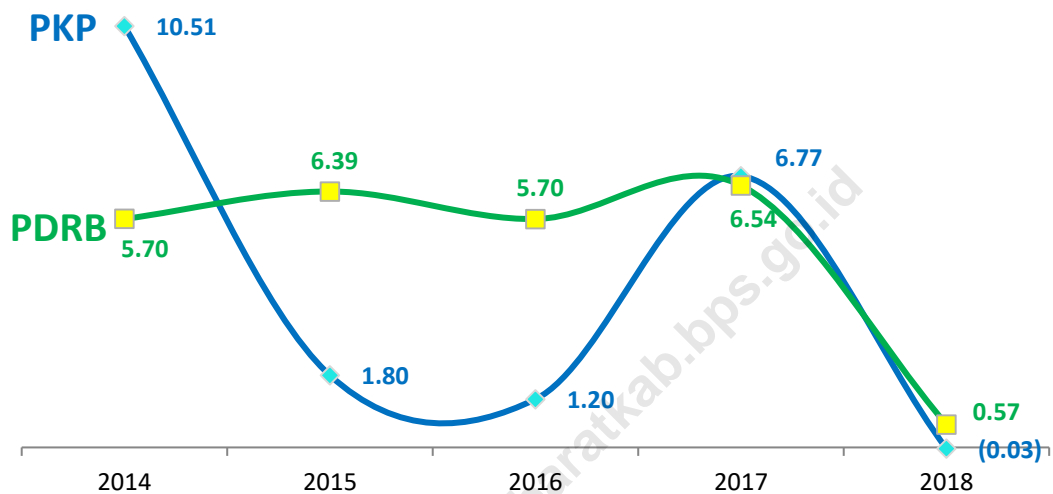


\*angka sementara  
\*\*angka sangat sementara

Laju indeks implisit komponen Konsumsi Pemerintah juga cenderung menurun. Pada Tahun 2014 laju IHI mencapai 21,91 persen. Kemudian pada tahun 2015 hingga 2018 laju IHI terus mengalami penurunan yakni sebesar 7,30 persen (2015), 4,06 persen (2016), dan 2,79 persen (2017). Pada tahun 2018 laju IHI konsumsi pemerintah hanya sebesar 1,62

persen. Pada tahun 2014 laju implisit mengalami peningkatan yang signifikan karena beberapa kementerian dan lembaga pemerintah mendapatkan renumerasi sehingga meningkatkan konsumsi pemerintah secara signifikan.

**Gambar 9. Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**



\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

Pada periode tahun 2013 hingga 2016, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah tidak searah dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat. Peranan konsumsi pemerintah tidaklah terlalu tinggi sehingga tidak dapat mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Barat. Hal ini terlihat pada tahun 2014 laju pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 10,51 persen, uniknya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat pada tahun itu hanya sebesar 5,70 persen. Begitupun sebaliknya pada tahun 2015 dan 2016, dimana laju pertumbuhan konsumsi pemerintah dibawah dua persen namun laju PDRB Kabupaten Lombok Barat tetap diatas 5 persen. Kondisi berbeda terjadi pada tahun 2017, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah yang hampir mirip di kisaran enam persen. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan konsumsi pemerintah dan PDRB Lombok Barat justru berbalik arah.



### 3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik), atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)<sup>9</sup>. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

PMTB merupakan penjumlahan neto dari pengadaan, pembuatan maupun pembelian barang modal (*fixed aset*). Modalnya sendiri bisa ditanamkan oleh pihak asing maupun swasta dalam bentuk investasi. Sehingga besarnya PMTB dapat menjadi salah satu indikator geliat investasi di suatu wilayah. Untuk dapat menggerakkan perekonomian Kabupaten Lombok Barat, campur tangan pihak swasta baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi masih sangat diperlukan. Suasana politik dan sosial yang kondusif serta potensi yang dimiliki oleh Lombok Barat dapat menjadi salah satu daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

**Tabel 11. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMTB					
Atas Dasar Harga Berlaku ( <i>juta Rp</i> )	3,816,621	4,277,910	4,883,080	5,352,738	5,502,613
Atas Dasar Harga Konstan 2010 ( <i>juta Rp</i> )	2,875,036	3,134,430	3,398,080	3,595,102	3,604,841
Proporsi terhadap PDRB (% Atas Dasar Harga Berlaku)	37.67	37.37	38.65	38.36	38.00
Pertumbuhan <sup>10</sup> PMTB (% Atas dasar Harga Konstan)	4.60	9.02	8.41	5.80	0.27
Struktur PMTB <sup>11</sup>					
a. Bangunan ( <i>juta Rp</i> )	3,202,682	3,585,767	4,138,553	4,580,166	4,686,381
(%)	83.91	83.82	84.75	85.57	85.17
Non Bangunan ( <i>juta Rp</i> )	613,939	692,143	744,528	772,573	816,233
(%)	16.09	16.18	15.25	14.43	14.83
b. Total PMTB (%)	100	100	100	100	100

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

<sup>9</sup> Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

<sup>10</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

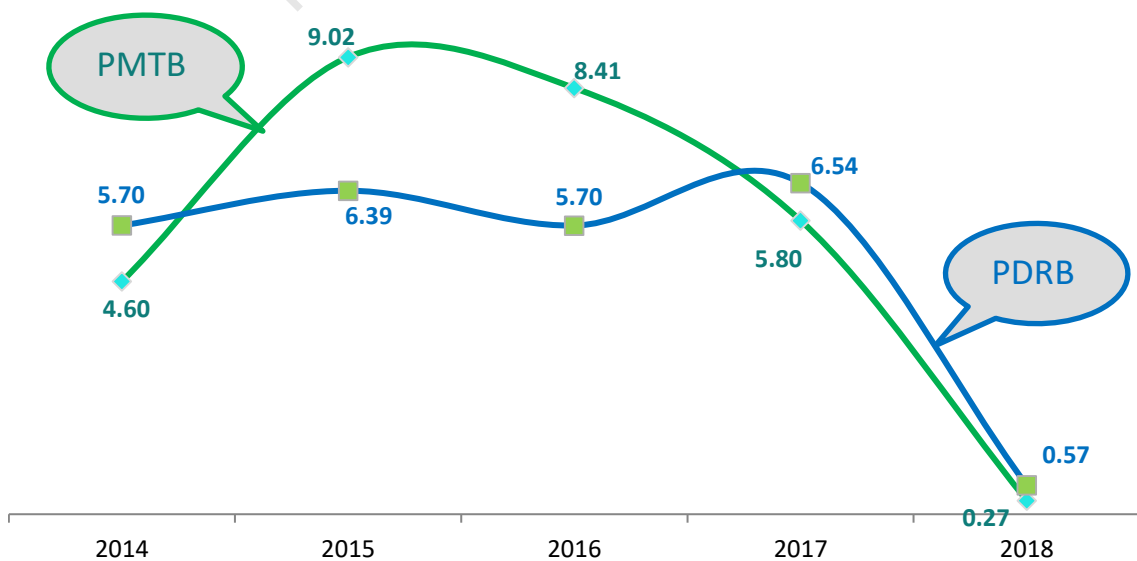
<sup>11</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Sebagai cerminan dari investasi yang telah berjalan di Lombok Barat, PMTB Adh berlaku Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2014 hanya mencapai Rp. 3,82 triliun. Pada tahun 2018 nilai PDRB adh berlaku tahun 2010 meningkat hingga Rp. 5,50 triliun. Kenaikan PMTB selama kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 44 persen. Sehingga diperoleh gambaran bahwa nilai investasi di kabupaten Lombok Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cukup menggembirakan dan menunjukkan iklim yang sehat.

Dalam pembentukan PDRB pengeluaran Lombok Barat, kontribusi PMTB ternyata cukup besar yaitu lebih dari 38 persen baik Adh berlaku maupun Adh konstan. Kontribusi PMTB ini juga bahkan lebih besar dari pada kontribusi komponen Konsumsi Lembaga Non profit dan bahkan Konsumsi Pemerintah. Geliat PMTB di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat dengan jelas pada pembangunan sarana dan prasarana fisik di kabupaten Lombok Barat.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Peranan PMTB bangunan terhadap PMTB di Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir berada diatas 80 persen. Hal ini menandakan bahwa pembangunan modal tetap di Kabupaten Lombok Barat sebagian besar berupa bangunan.

**Gambar 10. Laju Pertumbuhan PMTB Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**



\*angka sementara  
 \*\*angka sangat sementara

Selama kurun waktu tahun 2014 hingga 2016, laju pertumbuhan PMTB Kabupaten Lombok barat lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Lombok Barat. Pada tahun 2015 dan 2016 tersebut laju pertumbuhan PMTB berada diatas delapan persen. Sedangkan pada tahun 2017 meskipun mengalami perlambatan, namun peningkatan laju pertumbuhan komponen PMTB masih tergolong tinggi, yakni sebesar 5,80 persen.

Pada tahun 2018 laju pertumbuhan PMTB Kabupaten Lombok Barat cenderung stagnan yakni di angka 0,27 persen. Dampak peristiwa gempa juga mempengaruhi keputusan investor. Selain itu pembangunan yang dilakukan pemerintah juga tertunda. Meskipun demikian, laju pertumbuhan PMTB masih mampu berada di posisi positif memberikan signal bahwa perekonomian Kabupaten Lombok Barat masih dalam kondisi stabil dan tidak terlalu mengkhawatirkan.

### **3.2.5. Ekspor Barang dan Jasa**

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Lombok Barat tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Secara total, dalam kurun waktu 2014-2018 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2014 nilai ekspor barang dan jasa sebesar Rp. 2,65 triliun rupiah meningkat tajam menjadi Rp. 3,41 triliun rupiah pada tahun 2018. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar Rp. 2,45 triliun rupiah (2014); Rp. 2,59 triliun rupiah (2015); Rp. 2,70 triliun rupiah (2016); Rp. 2,85 triliun rupiah (2017); dan Rp. 2,87 triliun rupiah pada tahun 2018. Sementara itu, pada periode 2014 sampai dengan 2018, proporsi dalam PDRB justru cenderung menurun dari 26,15 persen pada tahun 2014 menjadi 23,58 persen di tahun 2018.

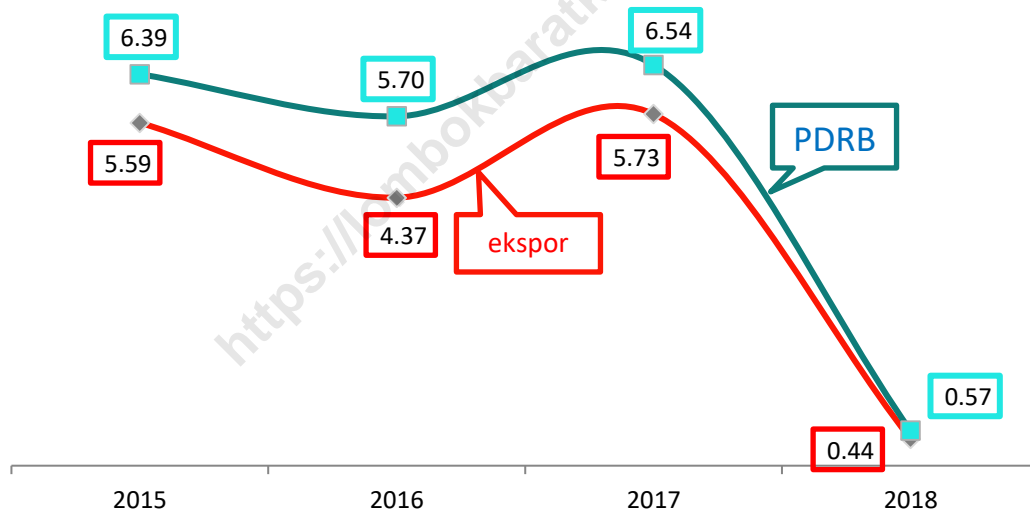
Tabel 12. Perkembangan Ekspor Kabupaten Lombok Barat 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor	2,649,456	2,939,889	3,113,853	3,306,813	3,414,966
a. ADHB (juta Rp)					
b. ADHK 2010 (juta Rp))	2,454,208	2,591,456	2,704,736	2,859,838	2,872,434
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	26.15	25.68	24.65	23.70	23.58
Pertumbuhan <sup>12</sup>	68.64	5.59	4.37	5.73	0.44

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

Gambar 10. Laju Pertumbuhan ekspor Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2014-2018



\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat dengan laju pertumbuhan ekspor seiring sejalan. Namun demikian, persentase laju pertumbuhan ekspor masih dibawah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat. Kekuatan ekspor yang terjadi di Lombok Barat belum dapat dimaksimalkan. Dengan kekayaan alam yang

<sup>12</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

melimpah, terutama hasil pertanian diharapkan mampu terus meningkat untuk didistribusikan keluar Kabupaten Lombok Barat.

### **3.2.6. Impor Barang dan Jasa**

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Lombok Barat. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Lombok Barat di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Lombok Barat terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Lombok Barat meningkat (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2014 sampai dengan 2018. Pada tahun 2014 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 6,43 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 6,64 triliun pada tahun 2015, Rp. 7,03 triliun pada tahun 2016, dan menjadi Rp. 7,26 triliun pada tahun 2017. Sepanjang tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat mengimpor sebanyak Rp. 7,58 triliun.

**Tabel 13. Perkembangan Impor Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**

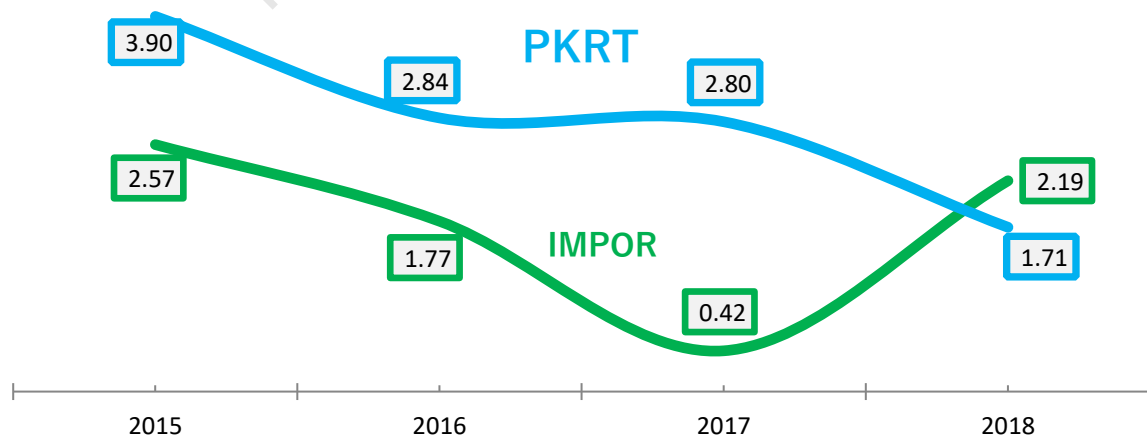
Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku ( <i>juta Rp</i> )	6,428,787	6,641,627	7,032,541	7,258,485	7,582,076
Atas Dasar Harga Konstan 2010 ( <i>juta Rp</i> )	5,011,778	5,140,351	5,231,310	5,253,471	5,368,544
Proporsi terhadap PDRB ( <i>% Atas Dasar Harga Berlaku</i> )	63.45	58.02	55.67	52.01	52.36
Pertumbuhan <sup>13</sup> konsumsi pemerintah ( <i>% Atas dasar Harga Konstan</i> )	28.82	2.57	1.77	0.42	2.19

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2014 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 63,45 persen. Pada tahun tahun berikutnya peranan komponen impor terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 peranan komponen impor hanya sebesar 52,36 persen.

**Gambar 11. laju Pertumbuhan Impor Terhadap laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**



\*angka sementara


\*\*angka sangat sementara

<sup>13</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (*atas dasar harga konstan / ATAS DASAR HARGAK 2000*)

Laju Pertumbuhan Impor di Kabupaten Lombok Barat searah dengan laju pertumbuhan Konsumsi rumah tangga. Pergerakan kedua komponen ini beriringan meskipun nilai penurunan atau kenaikan laju pertumbuhan tidak sama. Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga selalu lebih tinggi daripada laju pertumbuhan impor. Sama arahnya kedua komponen ini mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga dipenuhi dari aktivitas impor di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Menariknya pada tahun 2018 ini laju pertumbuhan impor meningkat pesat dibandingkan dengan kenaikan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Karena bantuan yang terus mengalir dari luar Kabupaten Lombok Barat untuk masyarakat setelah peristiwa gempa hebat yang terjadi di Pulau Lombok.

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



**BAB 4**  
**PERKEMBANGAN AGREGAT**  
**PDRB PENGELUARAN KAB.**  
**LOMBOK BARAT**



--halaman ini sengaja dikosongkan--

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



# BAB IV

## PERKEMBANGAN

### AGREGAT PDRB

### PENGELUARAN KAB.

### LOMBOK BARAT

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

#### 4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Lombok Barat di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

**Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB ( <i>juta Rp</i> )					
- ADHB	10,131,269	11,447,645	12,633,108	13,955,402	14,480,330
- ADHK 2010	8,708,308	9,264,355	9,792,221	10,432,244	10,491,888
PDRB perkapita ( <i>Juta Rp</i> )					
- ADHB	15.72	17.48	18.99	20.67	21.13
- ADHK 2010	13.51	14.15	14.72	15.45	15.31
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	3.98	4.71	4.07	4.94	-0.89
Jumlah penduduk ( <i>000 org</i> )	644,586	654,892	665,132	675,222	685,161
Pertumbuhan	1.65	1.60	1.56	1.52	1.47

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Nilai PDRB per kapita Lombok Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 15,72 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 21,13 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Jika melihat tanpa inflasi PDRB perkapita Kabupaten Lombok Barat tahun 2018 mengalami penurunan hingga 0.89 persen. Penurunan ini dikarenakan kenaikan PDRB tidak sebesar kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Barat. Dampak gempa sangat terlihat pada PDRB perkapita atas dasar harga konstan ini, yang artinya tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Lombok Barat mengalami sedikit kemunduran. Pada empat tahun sebelumnya, PDRB perkapita mengalami kenaikan tiga hingga empat persen. Kondisi ini menandakan perekonomian Kabupaten Lombok barat sebelum gempa melanda berada pada terus mengalami perkembangan kearah yang lebih baik.

## 4.2. PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 15. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (juta Rp)					
a. Rumah tangga	8,164,870	8,784,658	9,452,763	10,115,601	10,633,903
b. LNPRT	192,241	204,507	222,792	246,589	287,635
c. Pemerintah	1,686,539	1,842,175	1,940,091	2,131,480	2,165,418
Jumlah	10,043,650	10,831,340	11,615,646	12,493,670	13,086,956
PDRB (ADHB) (juta Rp)	10,131,269	11,447,645	12,633,108	13,955,402	14,480,330

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

## 5.1. Average propensity To Consume (APC) dan Average Propensity To save (APS)

Indikator ini menjelaskan kecenderungan atas keinginan untuk mengkonsumsi (*Average Propensity to Consume/APC*) dan keinginan untuk menabung (*Average Propensity to Save/APS*), yang dinyatakan dalam satuan rasio. Dengan demikian dapat diartikan, apabila pendapatan meningkat, tetapi APC menurun, maka APS akan meningkat. Sebaliknya apabila pendapatan meningkat dan APC meningkat, maka APS akan menurun. Rasio yang digunakan merupakan perbandingan nilai antara bagian dari total pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan bagian yang digunakan untuk tabungan.

**Tabel 16. Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save  
Tahun 2014—2018**

Uraian	2014	2015	2016*	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>APC</b>	0.99	0.95	0.92	0.90	0.90
<b>APS</b>	0.01	0.05	0.08	0.10	0.10

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

APC kabupaten Lombok barat sangatlah tinggi. Rata-rata keinginan untuk mengkonsumsi masyarakat kabupaten Lombok Barat sebesar 90 persen pada tahun 2018. meskipun tinggi, namun dari tahun ke tahun rata-rata untuk mengkonsumsi semakin rendah. hal ini terlihat, dimana pada tahun 2014 rata-rata keinginan untuk masyarakat mengkonsumsi dari pendapatan yang dimiliki sebesar 99 persen dan berselang lima tahun kemudian sebesar 90 persen. Hal ini dapat dianalisis bahwa masyarakat Lombok Barat sudah memulai mengalokasikan pendapatan tidak hanya untuk konsumsi tapi sudah mulai disimpan atau untuk modal.

### 5.3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap

pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

**Tabel 17. Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (juta Rp)	8,708,308	9,264,355	9,792,221	10,432,244	10,491,888
Perubahan (juta Rp)	469,611	556,047	527,866	640,023	59,644
PMTB (ADHK 2010) (juta Rp)	2,875,036	3,134,430	3,398,080	3,595,102	3,604,841
ICOR	6.12	5.64	6.44	5.62	60.44

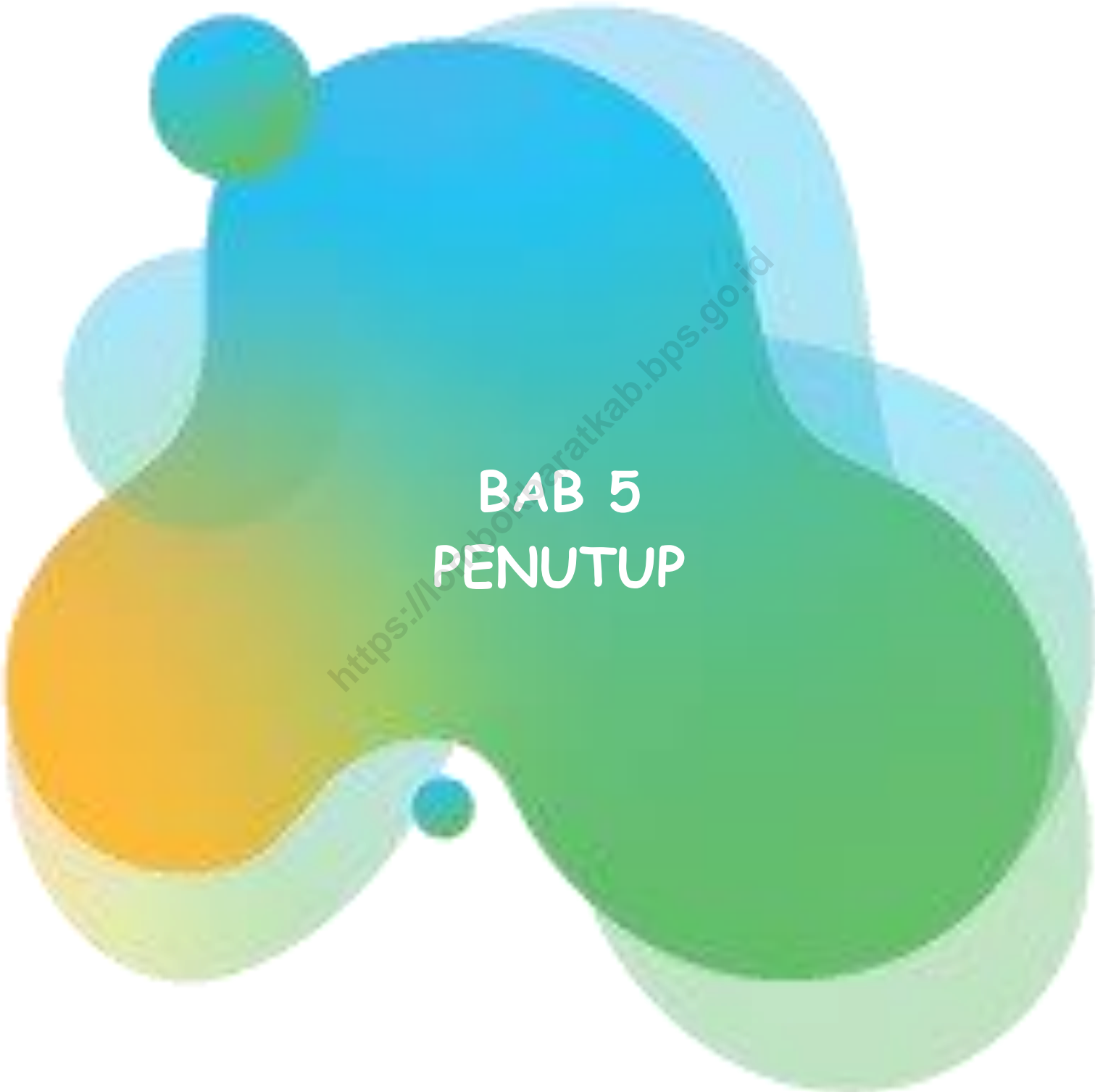
\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

ICOR merupakan kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1% produk domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2018, untuk meningkatkan satu persen nilai PDRB Kabupaten Lombok Barat membutuhkan investasi sebesar 60,44 persen dari PDRB.

--halaman ini sengaja dikosongkan--

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



<https://lombokbaratkab.bps.go.id>

# BAB 5 PENUTUP



--halaman ini sengaja dikosongkan--

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>



## BAB V PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Lombok Barat pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang

disajikan menjadi lebih informatif.

3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2014 sampai dengan 2018, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Lombok Barat terhadap ekonomi luar daerah.



# LAMPIRAN

<https://lombokkab.go.id/bps-go.id>

--halaman ini sengaja dikosongkan--

<https://lombokbaratkab.bps.go.id>

**Lampiran 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018**

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	8,164,870	8,784,658	9,452,763	10,115,601	10,633,903
Makanan, Minuman, dan Rokok	4,036,701	4,336,655	4,724,154	5,054,848	5,302,935
Pakaian dan Alas Kaki	301,904	325,826	359,183	380,864	406,630
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,908,543	2,104,921	2,254,419	2,431,055	2,582,889
Kesehatan dan Pendidikan	365,193	401,234	446,988	492,928	532,498
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,231,423	1,275,354	1,294,339	1,347,822	1,401,325
Hotel dan Restoran	171,346	182,554	200,811	224,086	215,747
Lainnya	149,760	158,115	172,869	183,997	191,878
<b>Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	192,241	204,507	222,792	246,589	287,635
<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	1,686,539	1,842,175	1,940,091	2,131,480	2,165,418
<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	3,816,621	4,277,910	4,883,080	5,352,738	5,502,613
Bangunan	3,202,682	3,585,767	4,138,553	4,580,166	4,686,381
Non-Bangunan	613,939	692,143	744,528	772,573	816,233
<b>Perubahan Inventori</b>	50,329	40,133	53,070	60,665	57,871
<b>Ekspor</b>	2,649,456	2,939,889	3,113,853	3,306,813	3,414,966
<b>Impor</b>	6,428,787	6,641,627	7,032,541	7,258,485	7,582,076
<b>PDRBe</b>	10,131,269	11,447,645	12,633,108	13,955,402	14,480,330

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018**

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	6,987,150	7,259,445	7,465,770	7,675,011	7,806,017
Makanan, Minuman, dan Rokok	3,425,606	3,542,778	3,636,297	3,740,261	3,760,373
Pakaian dan Alas Kaki	269,368	274,098	284,972	291,070	300,209
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,654,557	1,734,978	1,790,454	1,825,096	1,883,413
Kesehatan dan Pendidikan	310,789	322,352	335,266	349,015	361,798
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,064,433	1,114,715	1,139,974	1,174,974	1,211,120
Hotel dan Restoran	138,249	143,281	149,057	161,327	152,887
Lainnya	124,150	127,244	129,749	133,268	136,216
<b>Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	157,916	163,939	173,360	185,391	209,751
<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	1,211,436	1,233,236	1,248,076	1,332,564	1,332,208
<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	2,875,036	3,134,430	3,398,080	3,595,102	3,604,841
Bangunan	2,427,473	2,646,761	2,908,351	3,097,685	3,088,670
Non-Bangunan	447,563	487,669	489,729	497,418	516,170
<b>Perubahan Inventori</b>	34,339	22,199	33,509	37,809	35,181
<b>Ekspor</b>	2,454,208	2,591,456	2,704,736	2,859,838	2,872,434
<b>Impor</b>	5,011,778	5,140,351	5,231,310	5,253,471	5,368,544
<b>PDRBe</b>	8,708,308	9,264,355	9,792,221	10,432,244	10,491,888

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012-2015**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	80.59	76.74	74.83	72.49	73.44
Makanan, Minuman, dan Rokok	39.84	37.88	37.40	36.22	36.62
Pakaian dan Alas Kaki	2.98	2.85	2.84	2.73	2.81
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	18.84	18.39	17.85	17.42	17.84
Kesehatan dan Pendidikan	3.60	3.50	3.54	3.53	3.68
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	12.15	11.14	10.25	9.66	9.68
Hotel dan Restoran	1.69	1.59	1.59	1.61	1.49
Lainnya	1.48	1.38	1.37	1.32	1.33
<b>Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	1.90	1.79	1.76	1.77	1.99
<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	16.65	16.09	15.36	15.27	14.95
<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	37.67	37.37	38.65	38.36	38.00
Bangunan	31.61	31.32	32.76	32.82	32.36
Non-Bangunan	6.06	6.05	5.89	5.54	5.64
<b>Perubahan Inventori</b>	0.50	0.35	0.42	0.43	0.40
<b>Ekspor</b>	26.15	25.68	24.65	23.70	23.58
<b>Impor</b>	63.45	58.02	55.67	52.01	52.36
<b>PDRBe</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara



**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010-100 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018**

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	4.54	3.90	2.84	2.80	1.71
Makanan, Minuman, dan Rokok	3.88	3.42	2.64	2.86	0.54
Pakaian dan Alas Kaki	3.99	1.76	3.97	2.14	3.14
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6.22	4.86	3.20	1.93	3.20
Kesehatan dan Pendidikan	3.53	3.72	4.01	4.10	3.66
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5.05	4.72	2.27	3.07	3.08
Hotel dan Restoran	4.65	3.64	4.03	8.23	(5.23)
Lainnya	0.16	2.49	1.97	2.71	2.21
<b>Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	12.59	3.81	5.75	6.94	13.14
<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	10.51	1.80	1.20	6.77	(0.03)
<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	4.60	9.02	8.41	5.80	0.27
Bangunan	4.92	9.03	9.88	6.51	(0.29)
Non-Bangunan	2.88	8.96	0.42	1.57	3.77
<b>Ekspor</b>	68.64	5.59	4.37	5.73	0.44
<b>Impor</b>	28.82	2.57	1.77	0.42	2.19
<b>PDRBe</b>	5.70	6.39	5.70	6.54	0.57

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 5. IHI PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018**

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	116.86	121.01	126.61	131.80	136.23
Makanan, Minuman, dan Rokok	117.84	122.41	129.92	135.15	141.02
Pakaian dan Alas Kaki	112.08	118.87	126.04	130.85	135.45
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	115.35	121.32	125.91	133.20	137.14
Kesehatan dan Pendidikan	117.51	124.47	133.32	141.23	147.18
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	115.69	114.41	113.54	114.71	115.70
Hotel dan Restoran	123.94	127.41	134.72	138.90	141.12
Lainnya	120.63	124.26	133.23	138.07	140.86
<b>Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	121.74	124.75	128.51	133.01	137.13
<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	139.22	149.38	155.45	159.95	162.54
<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	132.75	136.48	143.70	148.89	152.65
Bangunan	131.93	135.48	142.30	147.86	151.73
Non-Bangunan	137.17	141.93	152.03	155.32	158.13
<b>Ekspor</b>	107.96	113.45	115.13	115.63	118.89
<b>Impor</b>	128.27	129.21	134.43	138.17	141.23
<b>PDRBe</b>	116.34	123.57	129.01	133.77	138.01

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

## Lampiran 6. Laju IHI PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>4.88</b>	<b>3.56</b>	<b>4.63</b>	<b>4.09</b>	<b>3.36</b>
Makanan, Minuman, dan Rokok	5.76	3.88	6.13	4.03	4.35
Pakaian dan Alas Kaki	2.73	6.06	6.03	3.82	3.52
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4.32	5.18	3.78	5.79	2.96
Kesehatan dan Pendidikan	2.30	5.93	7.11	5.93	4.21
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4.84	(1.10)	(0.76)	1.03	0.87
Hotel dan Restoran	2.67	2.80	5.74	3.10	1.59
Lainnya	2.90	3.01	7.22	3.63	2.03
<b>Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>11.49</b>	<b>2.47</b>	<b>3.02</b>	<b>3.50</b>	<b>3.10</b>
<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>21.91</b>	<b>7.30</b>	<b>4.06</b>	<b>2.90</b>	<b>1.62</b>
<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>6.09</b>	<b>2.81</b>	<b>5.29</b>	<b>3.61</b>	<b>2.52</b>
Bangunan	5.17	2.69	5.04	3.91	2.62
Non-Bangunan	11.14	3.47	7.12	2.16	1.81
<b>Ekspor</b>	<b>3.77</b>	<b>5.09</b>	<b>1.48</b>	<b>0.44</b>	<b>2.82</b>
<b>Impor</b>	<b>3.45</b>	<b>0.73</b>	<b>4.04</b>	<b>2.78</b>	<b>2.22</b>
<b>PDRBe</b>	<b>6.65</b>	<b>6.21</b>	<b>4.41</b>	<b>3.69</b>	<b>3.17</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

I

# DAFTAR PUSTAKA

---

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. \_\_\_\_\_, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. \_\_\_\_\_, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. \_\_\_\_\_, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang- Gerung- lombok barat  
telp/fax : (0370) 681550 E-Mail : [bps5201@bps.go.id](mailto:bps5201@bps.go.id)  
Website : [lombokbaratkab.bps.go.id](http://lombokbaratkab.bps.go.id)